

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 *Corporate Social Responsibility* (CSR)

2.1.1.1 Pengertian *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 pasal 1 ayat 3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) dalam *World Bank* (2002) yaitu komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komuniti-komuniti setempat (lokal) dan masyarakat secara keseluruhan, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan.

Menurut Untung (2009:1) dalam (Kholis, 2020) *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial dan lingkungan.

Menurut Kuswanti & Sutowo (2022: 15) menjelaskan bahwa *Corporate social responsibility* (CSR) adalah komitmen bisnis yang berkontribusi pada

pertumbuhan ekonomi dan membantu karyawan bekerja sama dengan pimpinan mereka. Kegiatan CSR menghasilkan komunikasi sosial, guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya, dengan cara yang baik untuk aktivitas dan pengembangan perusahaan.

Definisi lain mengungkapkan dalam buku Rochmaniah & Sinduwiatmo (2020: 3) bahwa pengertian CSR mencakup hal-hal berikut:

- a. Pelaksanaan CSR untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
- b. Sasaran CSR adalah *stakeholders* yang terdiri dari *stakeholders* internal dan eksternal perusahaan.
- c. Bidang kerja CSR meliputi manusia dan lingkungannya.

Menurut Shakila et al. (2024) mengungkapkan *corporate social responsibility* (CSR) merupakan usaha yang ditempuh oleh perusahaan untuk menunjukkan komitmennya terhadap tanggung jawab sosial, sebagai manifestasi dari prinsip-prinsip etika dalam mencapai kinerja jangka panjang.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan komitmen perusahaan yang berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial dan lingkungan baik untuk perusahaan, komunitas, dan masyarakat setempat.

2.1.1.2 Manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Terdapat manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, baik bagi perusahaan itu sendiri, masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Wibisono (2007: 99) dalam (Kholis, 2020) menjelaskan manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan CSR, yaitu:

- a. Bagi Perusahaan. Terdapat empat manfaat yang diperoleh perusahaan dengan mengimplementasikan CSR. Pertama, keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra yang positif dari masyarakat luas. Kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal 20 (*capital*). Ketiga, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia (*human resources*) yang berkualitas. Keempat, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (*critical decision making*) dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko (*risk management*).
- b. Bagi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai-tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai pekerja. Jika terdapat masyarakat adat atau masyarakat lokal, praktik CSR akan menghargai keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut.
- c. Bagi lingkungan, praktik CSR akan mencegah eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat polusi dan justru perusahaan terlibat mempengaruhi lingkungannya.

- d. Bagi negara, praktik CSR yang baik akan mencegah apa yang disebut “*corporate misconduct*” atau malapraktik bisnis seperti penyuapan pada aparat negara atau aparat hukum yang memicu tingginya 21 korupsi. Selain itu, negara akan menikmati pendapatan dari pajak yang wajar (yang tidak digelapkan) oleh perusahaan.

Sedangkan dalam buku Rochmaniah & Sinduwiatmo (2020) membagi dua manfaat CSR yaitu dari sisi internal dan eksternal antara lain sebagai berikut:

a. Manfaat Internal CSR

1. Meningkatkan kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) dengan pelatihan keterampilan meningkatkan manajemen SDM, meningkatkan loyalitas, dan dukungan pegawai.
2. Kepedulian terhadap lingkungan dengan upaya untuk mengurangi pencemaran.
3. Membangun budaya dan kapabilitas organisasi, meningkatkan koordinasi, serta peran pegawai dalam organisasi.
4. Dapat berkontribusi pada perbaikan kinerja keuangan dan meningkatkan kepemilikan modal.

b. Manfaat Eksternal CSR

1. Meningkatkan citra perusahaan sebagai institusi yang bertanggung jawab secara sosial.
2. Menciptakan produk ramah lingkungan sesuai dengan karakteristik perusahaan.

3. Membangun hubungan baik dengan komunitas dan memperkuat citra positif perusahaan.
4. Memberikan penghargaan dan melindungi perusahaan dari dampak perilaku buruk.

2.1.1.3 Prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Prinsip-prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berhasil menurut Pearce II dan Robinson (2008: 92) sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi misi jangka panjang yang tahan lama
Perusahaan memberikan kontribusi sosial terbesar jika mengidentifikasi tantangan kebijakan yang penting dan berlangsung lama serta berpartisipasi pada solusinya dalam jangka panjang.
- b. Mengontribusikan yang telah dilakukan
Perusahaan memaksimalkan manfaat dan kontribusi perusahaannya jika perusahaan itu dapat meningkatkan kemampuan inti serta mengontribusikan produk dan jasa yang didasarkan pada keahlian yang digunakan dalam atau yang dihasilkan dari operasi normalnya.
- c. Mengontribusikan jasa khusus berskala besar
Perusahaan memiliki dampak sosial terbesar ketika perusahaan memberikan kontribusi khusus kepada usaha koperasi berskala besar.
- d. Menimbang pengaruh pemerintah
Dukungan pemerintah bagi partisipasi perusahaan dalam CSR atau paling tidak kerelaannya untuk menghilangkan hambatan sehingga dapat memberikan pengaruh positif yang penting.

e. Menyusun dan menilai total paket manfaat

Perusahaan memperoleh manfaat terbesar dari kontribusi sosialnya jika memberikan harga pada total paket manfaat. Penilaian ini sebaiknya mencakup kontribusi sosial yang diberikan maupun dampak reputasi yang memperkuat atau memperkaya posisi perusahaan di mata para konstituennya.

Lebih lanjut Crowther dan Aras (2008) menggarisbawahi beberapa prinsip sebagai acuan dalam menengarai aktivitas CSR. Prinsip-prinsip tersebut adalah :

- a. *Sustainability*, Yakni prinsip CSR yang menekankan pada efek atau dampak masa depan akibat tindakan perusahaan atau korporasi pada saat ini. Contoh, penggunaan sumber daya alam oleh suatu korporasi pada masa kini harus diimbangi oleh adanya perhatian serius melalui pemikiran yang sungguh-sungguh apa dampaknya terhadap generasi mendatang dan lingkungan masa depan. Dengan demikian pengukuran *sustainability* mencakup jumlah atau kuantitas dari sumber daya alam yang dikonsumsi oleh korporasi, dan hubungannya dengan jumlah atau kuantitas yang mampu dipulihkan kembali untuk kehidupan masa depan.
- b. *Accountability*, Prinsip ini menggarisbawahi bahwa pada dasarnya setiap organisasi adalah bagian dari masyarakat luas, sehingga tanggung jawab suatu organisasi atau korporasi tidak hanya sebatas pada pemilik semata, melainkan juga pada seluruh *stakeholders* baik internal maupun eksternal. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan manfaat dan dampaknya terhadap eksternal dan internal *stakeholder*.

- c. *Transparency*, Suatu prinsip CSR yang berarti bahwa apa pun tindakan organisasi atau korporasi yang berdampak dan berpengaruh terhadap lingkungan eksternal harus dikomunikasikan secara detail latar belakang tindakan korporasi dan tujuannya pada masyarakat sekitar. Informasi ini penting sebagai bentuk pertanggungjawaban pada eksternal *stakeholder* secara transparan.

2.1.1.4 Pengukuran *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Pengukuran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dilakukan dengan menggunakan panduan informasi *Global Reporting initiative* (GRI). Pelaporan keberlanjutan yang dikembangkan berdasarkan Standar GRI yang memberikan informasi tentang kontribusi positif atau negatif organisasi terhadap pembangunan berkelanjutan untuk melaporkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial secara publik. Pengukuran dilakukan menggunakan *Corporate Social Responsibility Index* (CSRI) yang disesuaikan dengan indikator *Global Reporting Initiative* (GRI). Indikator dalam penelitian ini menggunakan standar GRI 2021. Dalam standar GRI 2021 ada 117 indikator kinerja yang mencakup dalam aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Berikut merupakan rincian laporan tabel indikator pengungkapan berdasarkan standar GRI 2021 dengan 117 item pengungkapan.

Tabel 2. 1
Indikator GRI 2021

NO	KODE	INDIKATOR
GRI 2: Organisasi dan praktik pelaporan		
1.	2-1	Rincian organisasi
2.	2-2	Entitas yang dimasukkan dalam pelaporan keberlanjutan organisasi

3.	2-3	Periode, frekuensi, dan titik kontak pelaporan
4.	2-4	Penyajian kembali informasi
5.	2-5	Penjaminan eksternal
GRI 2: Aktivitas dan Pekerja		
6.	2-6	Aktivitas, rantai nilai, dan hubungan bisnis lainnya
7.	2-7	Tenaga kerja
8.	2-8	Pekerja yang bukan pekerja langsung
GRI 2: Tata Kelola		
9.	2-9	Struktur dan komposisi tata kelola
10.	2-10	Pencalonan dan pemilihan badan tata kelola tertinggi
11.	2-11	Ketua badan tata kelola tertinggi
12.	2-12	Peran badan tata kelola tertinggi dalam mengawasi manajemen dampak
13.	2-13	Delegasi tanggung jawab untuk mengelola dampak
14.	2-14	Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan
15.	2-15	Konflik kepentingan
16.	2-16	Komunikasi masalah penting
17.	2-17	Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi
18.	2-18	Evaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi
19.	2-19	Kebijakan remunerasi
20.	2-20	Proses untuk menentukan remunerasi
21.	2-21	Rasio kompensasi total tahunan
GRI 2: Strategi, kebijakan, dan praktik		
22.	2-22	Pernyataan tentang strategi pembangunan berkelanjutan
23.	2-23	Komitmen kebijakan
24.	2-24	Menanamkan komitmen kebijakan
25.	2-25	Proses untuk memperbaiki dampak negatif
26.	2-26	Mekanisme untuk mencari nasihat dan mengemukakan masalah
27.	2-27	Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan
28.	2-28	Asosiasi keanggotaan
20.	2-20	Pendekatan untuk keterlibatan pemangku kepentingan
30.	2-30	Perjanjian perundingan kolektif
GRI 3: Topik Material		
31.	3-1	Proses atau panduan untuk menentukan topik material
32.	3-2	Daftar topik material
33.	3-3	Manajemen topik material
GRI 201: Kinerja Ekonomi		
34.	201-1	Nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan secara langsung.
35.	201-2	Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim
36.	201-3	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya
37.	201-4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah

GRI 202: Keberadaan Pasar		
38.	202-1	Rasio upah standar pegawai pemula (<i>entry level</i>) menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan.
39.	202-2	Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi yang signifikan.
GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung		
40.	203-1	Pembangunan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan.
41.	203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak.
GRI 204: Praktik Pengadaan		
42.	204-1	Perbandingan dari pembelian pemasok lokal di operasional yang signifikan.
GRI 205: Antikorupsi		
43.	201-1	Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi
44.	201-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur antikorupsi
45.	201-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil
GRI 206: Perilaku Anti persaingan.		
46.	206-1	Langkah-langkah hukum untuk perilaku anti persaingan, praktik anti pakat dan monopoli
GRI: 207 Pajak		
47.	207-1	Pendekatan terhadap pajak
48.	207-2	Tata kelola, pengontrolan, dan manajemen risiko pajak
49.	207-3	Keterlibatan pemangku kepentingan dan pengelolaan kepedulian yang berkaitan dengan pajak
50.	207-4	Laporan per negara
GRI 301: Material		
51.	301-1	Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume
52.	301-2	Material input dari daur ulang yang digunakan
53.	301-3	Produk pemerolehan ulang dan material kemasannya
GRI 302: Energi		
54.	302-1	Konsumsi energi dalam organisasi organisasi
55.	302-2	Konsumsi energi di luar organisasi
56.	302-3	Intensitas energi
57.	302-4	Pengurangan konsumsi energi
58.	302-5	Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa
GRI 303: Air dan Efluen		
59.	303-1	Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama
60.	303-2	Manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air
61.	303-3	Pengambilan air
62.	303-4	Pembuangan air
63.	303-5	Konsumsi air

GRI 304: Keanekaragaman Hayati		
64.	304-1	Lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman 8 hayati tinggi di luar kawasan lindung
65.	304-2	Dampak signifikan dari aktivitas, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati
66.	304-3	Habitat yang dilindungi atau direstorasi
67.	304-4	Spesies Daftar Merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi
GRI 305: Emisi		
68.	305-1	Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (cakupan 1).
69.	305-2	Emisi gas rumah kaca (GRK) energi tidak langsung (cakupan 2).
70.	305-3	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya (cakupan 3).
71.	305-4	Identitas emisi gas rumah kaca (GRK).
72.	305-5	Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK).
73.	305-6	Emisi bahan perusak ozon (ODS).
74.	305-7	Nitrogen oksida (NOx), belerang oksida (SOx), dan emisi udara signifikan lainnya
GRI 306: Limbah		
75.	306-1	Timbulan limbah dan dampak signifikan terkait limbah
76.	306-2	Bobot total Manajemen dampak signifikan terkait limbah
77.	306-3	Timbulan limbah
78.	306-4	Limbah yang dialihkan dari pembuangan akhir
79.	306-5	Limbah yang dikirimkan ke pembuangan akhir
GRI 308: Penilaian Lingkungan Pemasok		
80.	308-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan
81.	308-2	Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil
GRI 401: Kepegawaian		
82.	401-1	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan
83.	401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan pada kurun waktu tertentu atau paruh waktu
84.	401-3	Cuti melahirkan
GRI 402: Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen		
85.	402-1	Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional
GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja		
86.	403-1	Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja
87.	403-2	Pengungkapan, Pengidentifikasian bahaya, penilaian risiko, dan investigasi Insiden

88.	403-3	Layanan kesehatan kerja
89.	403-4	Partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja tentang kesehatan dan keselamatan kerja
90.	403-5	Pelatihan pekerja mengenai kesehatan dan keselamatan kerja
91.	403-6	
92.	403-7	Peningkatan kualitas kesehatan pekerja
93.	403-8	Pencegahan dan mitigasi dampak-dampak kesehatan dan keselamatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis
94.	403-9	Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja
95.	403-10	Kecelakaan kerja Kecelakaan kerja
GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan		
96.	404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan
97.	404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan
98.	404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier
GRI 405: Keanekaragaman dan Peluang Setara		
99.	405-1	Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan
100.	405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki
GRI 406: Nondiskriminasi		
101.	406-1	Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan
GRI 407: Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif		
102.	407-1	Operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko
GRI 408: Pekerja anak		
103.	408-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak
GRI 409: Kerja Paksa atau Wajib Kerja		
104.	409-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja
GRI 410: Praktik Keamanan		
105.	410-1	Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia
GRI 411: Hak Masyarakat Adat		
106	411-1	Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat
GRI 413: Masyarakat Setempat		
107.	413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat setempat, penilaian dampak, dan program pengembangan
108.	413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat setempat

GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok		
109.	414-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial
110.	414-2	Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil
GRI 415: Kebijakan Publik		
111.	415-1	Kontribusi politik
GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan		
112.	416-1	Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa
113.	416-2	Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa
GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan		
114.	417-1	Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa
115.	417-2	Insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa
116.	417-3	Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran
GRI 418: Privasi Pelanggan		
117.	418-1	Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan

Sumber: globalreporting.org (2024)

Setiap item pengungkapan CSR akan diberi nilai 1 jika item diungkap oleh perusahaan dan diberi nilai 0 jika item tidak diungkapkan oleh perusahaan (Syadeli & Sa'adah, 2021). Hasil pengukuran pengungkapan tersebut kemudian akan dimasukkan ke dalam formulasi rumus sebagai berikut:

$$CSR = \sum \frac{Xi}{n}$$

Keterangan:

$\sum Xi$ = Jumlah item yang diungkapkan perusahaan, (1: jika item diungkap, 0: jika item tidak diungkap)

n = Jumlah keseluruhan item, $n = 117$

2.1.2 Kepemilikan Institusional

2.1.2.1 Pengertian Kepemilikan Institusional

Menurut Danta Putri & Setyarini (2024) kepemilikan institusional merupakan suatu kondisi dimana pihak institusi lain seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi dan lainnya memiliki saham terhadap perusahaan.

Suparlan (2019) mengemukakan bahwa kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak institusi lain yaitu kepemilikan oleh perusahaan atau lembaga lain. Kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang terbentuk institusi seperti institusi pemerintah, swasta, domestik maupun asing. Kepemilikan institusional merupakan satu alat yang digunakan untuk mengurangi *Agency conflict*. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif.

kepemilikan institusional juga didefinisikan sebagai tingkat kepemilikan saham oleh institusi dalam perusahaan, diukur oleh proporsi saham yang dimiliki oleh institusional pada akhir tahun yang dinyatakan dalam persentase menyatakan bahwa para investor institusional pada umumnya menginvestasikan dananya lebih besar (Septanta, 2023: 98).

Tarmizi & Perkasa (2022) mengungkapkan kepemilikan institusional dalam perusahaan berfungsi untuk menjadi pihak yang melakukan monitor dan pengawasan terhadap kinerja manajemen. Maka dengan adanya kepemilikan institusional dalam perusahaan pihak manajemen akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan, investasi, dan institusi lainnya, baik domestik maupun asing yang memainkan peran penting dalam pengawasan dan pengendalian manajemen melalui proses monitoring dengan tujuan untuk mengurangi konflik keagenan (*agency conflict*).

2.1.2.2 Peran Kepemilikan Institusional

Jensen dan meckling (1976) menyatakan peranan kepemilikan institusional sangat penting untuk mengurangi konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham. Investor institusional dianggap dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk mengawasi keputusan manajer. Investor institusional tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba karena mereka terlibat dalam pengambilan strategis.

Menurut Karunia et al. (2024) pemilik institusional mempunyai peran penting untuk bertanggung jawab menerapkan prosedur pemantauan, pendisiplinan, dan mempengaruhi manajemen dalam bertindak. Pemilik institusional memiliki hak suara untuk mengawasi tindakan manajer yang berfokus pada kinerja ekonomi dan mencegah peluang untuk berperilaku mementingkan diri atau oportunistik. Hak suara ini didasarkan pada jumlah saham yang mereka miliki.

2.1.2.3 Kelebihan Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional juga memiliki kelebihan, (Marsinah, 2021) mengungkapkan bahwa kelebihan kepemilikan institusional di antaranya:

- a. Kepemilikan institusional memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi, sehingga mereka dapat menguji keandalan informasi
- b. Kepemilikan institusional memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan
- c. Kepemilikan saham institusional biasanya mampu mengurangi masalah agensi di dalam perusahaan.
- d. Fungsi pengendalian akan semakin efektif jika pemegang saham institusional memiliki lebih banyak saham.

2.1.2.4 Pengukuran Kepemilikan Institusional

(Pratomo & Nuraulia, 2021), mengungkapkan kepemilikan institusional merupakan komponen penting dalam mengurangi konflik keagenan. Ketika sebuah institusi atau lembaga terkait memiliki kepemilikan yang lebih besar, mereka memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mengawasi manajemen perusahaan dalam segala aktivitasnya. Investor institusional dianggap dapat melacak perusahaan untuk memastikan bahwa keputusan manajemen efektif. Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan rasio antara jumlah lembar saham yang dimiliki oleh institusi terhadap jumlah lembar saham perusahaan yang beredar secara keseluruhan (Yuliyanti & Cahyonowati, 2023), dengan rumus berikut:

$$KI = \frac{\text{Jumlah Saham Institusional}}{\text{Total Saham yang Beredar}} \times 100\%$$

2.1.3 Dewan Direksi

2.1.3.1 Pengertian Dewan Direksi

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebutkan bahwa pengertian Direksi dalam Perseroan Terbatas adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.

Sementara dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa direksi adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik, sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik serta mewakili Emiten atau Perusahaan Publik, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Direksi adalah anggota unsur perusahaan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif di perusahaan. Direksi mengendalikan operasi perusahaan sehari-hari dalam batas-batas yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perseoran Terbatas (UUPT), Anggaran Dasar dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta di bawah pengawasan Dewan Komisaris (Syofyan, 2021: 54).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dewan direksi merupakan suatu organ perusahaan yang mempunyai wewenang dan

tanggung jawab penuh dalam pengelolaan perusahaan, baik dalam perseroan terbatas maupun emiten atau perusahaan publik. Direksi bertindak atas nama dan atas perintah perseroan, mengurus perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan yang terdapat dalam anggaran dasar, mewakilkan atau diwakilkan oleh perseroan dalam dan di luar pengadilan, serta melaksanakan pengurusan harian perseroan yang teratur dan lancar. Direksi bertanggung jawab kepada pemegang saham melalui RUPS dan bernaung di bawah naungannya dewan komisaris.

2.1.3.2 Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi

Menurut (Rismawandi, 2020) dalam menjalankan perseroan sebagaimana telah disebutkan dalam pengertian di atas, dewan direksi memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Direksi harus menjalankan tugas pengurusan Perseroan dengan niat baik dan penuh tanggung jawab dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang berkepentingan pada aktivitas perseroan.
- b. Direksi wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS. Mereka juga harus memastikan bahwa semua operasi Perseroan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Perseroan.
- c. Dalam memimpin dan mengurus perusahaan, direktur hanya memperhatikan kepentingan dan tujuan perusahaan serta terus berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan.

- d. Direksi mengembangkan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang komprehensif untuk memastikan bahwa perusahaan diurus dengan amanah dan transparan.
- e. Direksi memastikan bahwa tidak ada situasi di mana tanggung jawab dan kepentingan perusahaan bertentangan dengan kepentingan pribadi.

Adapun tanggung jawab dewan direksi menurut pasal 97 pasal 1,2, dan 3 UUPT Nomor 40 Tahun 2007 yaitu:

- 1. Direksi Bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- 2. Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan tujuan perseroan.
- 3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

2.1.3.3 Komposisi Dewan Direksi

Menurut Kemenrtian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2021) dalam Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) 2021 Memberikan penjelasan bahwa anggota dewan direksi dan dewan komisaris dipilih dan ditetapkan sedemikian rupa sehingga masing-masing terdiri dari para direktur dan komisaris yang memiliki komitmen, pengetahuan, kemampuan, keahlian, usia, latar belakang budaya, dan jender yang diperlukan untuk menjalankan peran pengelolaan dan pengawasan dewan direksi. Demikian

pula, dewan komisaris bertanggung jawab untuk menyusun struktur kompensasi, kebijakan kompensasi, dan besaran kompensasi bagi anggota direksi dan dewan komisaris. Selain itu, Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk menyusun komposisi dan prosedur pemilihan anggota direksi dan dewan komisaris serta standar dan kebijakan untuk pemilihan calon anggota direksi dan dewan komisaris.

Untuk menentukan jumlah anggota direksi, faktor-faktor seperti kondisi korporasi dan efektivitas pengambilan keputusan dipertimbangkan. Setidaknya satu direktur memiliki pengalaman kerja sebelumnya di sektor utama di mana perusahaan beroperasi. Anggota direksi yang menangani akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan pengetahuan akuntansi yang ditunjukkan oleh sertifikasi profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi akuntansi yang diakui oleh pemerintah (Kementrian Republik Indonesia Bidang Perekonomian, 2021)

Dalam (PUG-KI) 2021 dijelaskan selama proses pemilihan atau pemilihan kembali, informasi tentang calon direksi harus tersedia dan dapat diakses melalui situs web Perusahaan Terbuka dan/atau e-RUPS sejak tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. Informasi ini harus mencakup:

- a. Identitas calon dan alasan pengangkatan.
- b. Kompetensi inti, kualifikasi, dan latar belakang profesional.
- c. Jabatan saat ini di korporasi lain, serta peran penting di amal atau organisasi nirlaba.
- d. Faktor-faktor yang mempengaruhi independensi, seperti hubungan dengan pemegang saham pengendali.
- e. Lama masa jabatan.

- f. Kehadiran dalam rapat direksi (kecuali untuk direktur baru).
- g. Setiap kepemilikan saham dalam korporasi.

2.1.3.4 Pengukuran Dewan Direksi

Semua orang, termasuk investor, kreditor, masyarakat, karyawan, dan konsumen, menginginkan bahwa direksi dapat memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan dan menjalankan operasi perusahaan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dengan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh dewan direksi, diharapkan dewan direksi tidak hanya siap untuk menghadapi perubahan, tetapi juga mampu menghasilkan keuntungan dari perubahan tersebut. Pengukuran dewan direksi dilakukan dengan menggunakan skala rasio yang mengacu pada, (Yuliyanti & Cahyonowati, 2023) dengan rumus berikut:

$$\text{Dewan Direksi} = \sum \text{Dewan Direksi}$$

2.1.4 Komite Audit

2.1.4.1 Pengertian Komite Audit

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Sementara itu menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006) dalam Pedoman Umum GCG Indonesia yaitu Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang

bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen.

Menurut Syofyan (2021: 25) komite audit merupakan suatu badan yang dibentuk oleh dewan komisaris dari perusahaan yang tugasnya adalah untuk melakukan fungsi pengawasan dan menjaga independensi akuntan pemeriksa internal terhadap tim manajemen sesuai dengan prinsip GCG (*Good corporate Governance*).

Komite Audit adalah suatu tim yang bekerja secara independen dan profesional yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertugas untuk membantu fungsi dewan komisaris dalam pengawasan atas alur pelaporan laporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan pengimplementasian *corporate governance* di perusahaan (Ikatan Komite Audit) (Larasati & Fitriyana, 2024). Nursyamsiyah et al. (2024) mengungkapkan bahwa Komite audit merupakan badan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris, di mana anggotanya dipilih dari orang-orang independen yang kompeten di bidang akuntansi dan keuangan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa komite audit merupakan sebuah badan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu menjalankan fungsi pengawasan dalam perusahaan yang terdiri dari individu-individu berkompeten di bidang akuntansi dan keuangan dengan tugas utama komite audit meliputi pengawasan atas pelaporan keuangan, dan bertugas membantu pengawasan atas pelaporan keuangan, manajemen risiko, audit, dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

2.1.4.2 Pembentukan Komite Audit

Dalam Widyastuti (2023: 56) mengemukakan bahwa menurut POJK No. 55 tahun 2015, setiap emiten atau perusahaan publik harus membentuk komite audit dalam perusahaannya. Persyaratan yang ditetapkan dalam POJK No. 55 adalah sebagai berikut:

1. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris.
2. Komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris Independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik.
3. Komite audit diketuai oleh komisaris independen. Komisaris independen wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK. 04/2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik.

Anggota Komite Audit dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya, dan masa jabatan mereka tidak boleh lebih lama dari masa jabatan dewan komisaris sebagaimana yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 menjelaskan bahwa komite audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sebanyak empat kali dalam satu tahun. Menurut Syofyan (2021: 31) pertemuan yang teratur dan terkendali dengan baik akan membantu komite audit dalam memeriksa akuntansi berkaitan dengan sistem pengendalian internal, dan menjaga informasi manajemen.

2.1.4.3 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Menurut Tambunan & Tambunan (2021) memberikan pendapat mengenai tugas-tugas komite audit, di antaranya :

- a. Memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi.
- b. Mendorong terbentuknya struktur pengawasan intern yang memadai.
- c. Meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan.
- d. Mengkaji ruang lingkup dan ketentuan eksternal audit kewajaran biaya eksternal audit, serta kemandirian dan objektivitas eksternal auditor.
- e. Mempersiapkan surat iuran tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa eksternal audit. Hal ini terkait dengan prinsip pertanggungjawaban (*Responsibility*).

Disebutkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 pasal 10, Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan publik.
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik.

- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah dewan komisaris.
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada dewan komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan emiten atau perusahaan Publik.
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

2.1.4.4 Pengukuran Komite Audit

Menurut Tambunan & Tambunan (2021) eksistensi komite audit terkait erat dengan penegakan *Good Corporate Governance* dan menjadi tolak ukur, apakah perusahaan yang bersangkutan telah melaksanakan *Good Corporate Governance* atau belum.

Pengukuran komite audit dilakukan dengan menggunakan skala rasio yang mengacu pada (Yuliyanti & Cahyonowati, 2023), dengan rumus berikut:

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Komite Audit}$$

2.1.5 Financial Stability

2.1.5.1 Pengertian *Financial Stability*

Yerdavletova et al. (2020) mendefinisikan stabilitas keuangan sebagai stabilitas keadaan keuangan, yang dinyatakan dalam neraca keuangan, likuiditas aset yang cukup, tersedianya cadangan yang diperlukan, dan neraca keuangan yang stabil.

Menurut Gennad'evna (2019) *financial stability* (stabilitas keuangan) didefinisikan sebagai posisi keuangan perusahaan yang stabil, kemampuan perusahaan untuk beroperasi dan berkembang dengan sukses, dan keseimbangan yang konsisten antara dana sendiri dan pinjaman. Posisi keuangan yang stabil adalah hasil dari manajemen yang efektif dari semua komponen produksi dan ekonomi.

Menurut Jonathan's & Wijaya (2022) *financial stability* (stabilitas keuangan) merupakan gambaran mengenai stabil atau tidaknya suatu kondisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Manajemen perusahaan akan selalu berusaha agar keuangan suatu perusahaan selalu terlihat dengan baik atau selalu terlihat dengan stabil.

Kondisi keuangan suatu perusahaan digambarkan sebagai stabilitas keuangan. Kondisi aset perusahaan menunjukkan seberapa stabil keuangan perusahaan. Stabilitas keuangan sangat penting untuk dinilai karena dapat menunjukkan apakah perusahaan akan menghadapi ancaman dalam industri keuangan (Harrisy & Murtanto, 2024).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa stabilitas keuangan merupakan kondisi keuangan yang stabil di mana perusahaan mampu beroperasi dan berkembang dengan baik serta mempertahankan keseimbangan antara dana sendiri dan pinjaman. Pengelolaan efektif atas seluruh komponen produksi dan ekonomi perusahaan juga menunjukkan stabilitas keuangan, yang juga menunjukkan seberapa kuat posisi aset perusahaan dalam pasar.

2.1.5.2 Faktor dan Strategi Meningkatkan *Financial Stability*

Menurut Gennad'evna (2019: 12) persaingan dan kebijakan keuangan yang tidak tepat bukanlah satu-satunya masalah yang berdampak pada stabilitas keuangan perusahaan secara keseluruhan. Faktor-faktor hal tersebut dapat meliputi:

1. Potensi ekonomi.
2. Tingkat permintaan konsumen terhadap produk.
3. Struktur, diferensiasi, dan kualitas produk.
4. Tingkat ketergantungan pada investor.
5. Tingkat intervensi pemerintah terhadap perusahaan.

Analisis situasi keuangan yang stabil memungkinkan kita untuk memahami seberapa baik perusahaan mengelola sumber daya keuangannya selama periode

tersebut. Oleh karena itu diperlukan untuk menyesuaikan sumber daya keuangan dengan persyaratan pasar dan kebutuhan pengembangan perusahaan. Untuk meningkatkan stabilitas keuangan, perlu dilakukan (Gennad'evna, 2019: 12):

1. Meningkatkan dana perusahaan dengan melakukan revaluasi investasi dengan menilai hasil investasinya, yaitu memantau efektivitas investasi pada berbagai proyek perusahaan. Hasilnya, tidak hanya akan membantu menyelesaikan masalah peningkatan stabilitas keuangan, tetapi juga meningkatkan pendapatan dari kegiatan utama perusahaan.
2. Pengelolaan laba yang rasional. Tujuannya adalah untuk meningkatkan modal kerja guna pengembangan kegiatan, dan bukan untuk keuntungan sendiri;
3. Membatasi pinjaman untuk memastikan pertumbuhan perusahaan yang stabil dan menghindari ketidakmampuan membayar kewajibannya pada periode yang dibutuhkan.

Untuk menjaga stabilitas keuangan dalam lingkungan yang terus berubah, perusahaan harus memiliki strategi. Paling sering, masalah dalam meningkatkan dan mengelola stabilitas keuangan perusahaan dikaitkan dengan kurangnya strategi ini di perusahaan, akibatnya perusahaan tidak dapat mengelola sumber dayanya secara kompeten dan mengelola arus kas secara efektif. Oleh karena itu, strategi keuangan merupakan suatu pengungkit dalam pengembangan perusahaan, yang melaluinya perusahaan dapat mencari jalan keluar atas permasalahan dan kendala untuk pengembangan selanjutnya, serta dapat meminimalisir risiko kemerosotan stabilitas perusahaan (Gennad'evna, 2019).

2.1.5.3 Pengukuran *Financial Stability*

Stabilitas Keuangan juga menjadi salah satu faktor yang menjadi pertimbangan bagi investor dalam memilih entitas dalam berinvestasi. Stabilitas keuangan merupakan kunci untuk bertahan hidup dan menjadi dasar posisi yang kuat di pasar. Bagaimanapun, dengan menilai kondisi keuangan dan menentukan tingkat stabilitas, investor, pemasok, mitra dapat menentukan kemampuan keuangan perusahaan untuk masa depan dan pengembangan lebih lanjut. Semakin tinggi stabilitas perusahaan, semakin independen perusahaan terhadap perubahan kondisi pasar, sehingga risiko kebangkrutan pun berkurang (Gennad'evna: 2019). Pengukuran *Financial Stability* dilakukan dengan menggunakan skala rasio yang mengacu pada Widi et al., (2021), dengan rumus berikut:

$$Z\text{-Score} = \frac{(\text{ROA} + (\text{Total Equity} / \text{Total Assets}))}{\text{Standard Deviation (ROA)}}$$

2.1.6 *Grand Theory*

2.1.6.1 *Stakeholder Theory*

Menurut Freeman (1984) yang dikemukakan dalam “*Strategic Management: A Stakeholder*” mendefinisikan *stakeholder* sebagai seseorang atau sekelompok orang yang saling berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) proses sebuah perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaannya. Ada dua cabang teori tentang teori pemangku kepentingan, yaitu cabang etika dan cabang manajerial. Cabang etika menekankan bahwa para pemangku kepentingan

(stakeholders) memiliki hak untuk diperlakukan secara adil oleh perusahaan, tanpa memandang seberapa besar pengaruh mereka terhadap perusahaan. Di sisi lain, cabang manajerial berpendapat bahwa semakin besar pengaruh para stakeholders terhadap organisasi, semakin banyak upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengelola hubungan dengan mereka. Salah satu cara penting untuk menjaga hubungan baik ini adalah dengan memberikan pengungkapan informasi yang transparan. Menurut Zain (2021) *stakeholder* adalah kelompok atau individu yang diuntungkan atau dirugikan oleh tindakan perusahaan dan yang haknya telah dilanggar atau dihormati oleh tindakan perusahaan.

Menurut Maulana et al. (2023) dalam teori *stakeholder*, perusahaan memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada kinerja ekonomi dan keuangan. dalam teori ini, perusahaan harus memenuhi yang diharapkan untuk diakui oleh pemangku kepentingan dengan menggunakan pilihan sukarela dalam informasi lingkungan, intelektual, dan sosial.

2.1.6.2 Agency Theory

Menurut Jensen dan Meckling pada tahun 1976 menyatakan bahwa teori agensi merupakan hubungan agensi terjadi saat satu orang atau lebih (*principal*) memperkerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. *Principal* adalah pemilik saham atau investor dan yang dimaksud agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan.

Menurut Purba (2023) dalam teori agensi menyatakan bahwa setiap orang hanya termotivasi oleh kepentingannya sendiri, sehingga terjadi konflik antara *agent* dan *principal*. Jika terdapat perbedaan dua kepentingan dalam suatu perusahaan dan masing-masing pihak terus berusaha untuk mempertahankan keuntungan, konflik agensi sering terjadi. Oleh karena itu, untuk mengatasi konflik agensi, manajemen bertanggung jawab kepada investor dengan mengungkapkan informasi perusahaan secara sukarela.

2.1.7 Kajian Empiris

Kajian empiris adalah kajian yang didapat dari hasil temuan penelitian sebelumnya oleh peneliti lain dengan mengemukakan konsep yang relevan pada topik penelitian saat ini. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya, antara lain yaitu menurut Orazalin et al. (2024) dengan penelitian “*Does CSR contribute to the financial sector’s financial stability? The moderating role of a sustainability committee*” Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor keuangan yang termasuk dalam basis data Thomson Reuters Eikon tahun 2002-2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis regresi efek tetap. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap *financial stability*.

Menurut Widi et al. (2021) dengan judul penelitian “*Influence of Corporate Social Responsibility (CSR) on Financial Performance, Financial Inclusion, and Financial Stability Banking In Indonesia*” Penelitian ini dilakukan pada sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis regresi data panel. Hasil pada penelitian ini menunjukkan

bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap *financial stability*.

Menurut Stefany & Agustina (2022) dengan judul penelitian “*Do Corporate Social Responsibility and Political Connections Matter to Financial Performance and Financial Stability in the Banking Sector? Evidence from Indonesia*” Penelitian ini dilakukan pada sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis regresi kuadrat terkecil gabungan. Hasil pada penelitian menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan tidak berpengaruh terhadap stabilitas keuangan, sedangkan koneksi politik berpengaruh negatif baik terhadap kinerja keuangan maupun stabilitas keuangan.

Menurut Ramzan et al. (2021) dengan judul penelitian “*How does corporate social responsibility affect financial performance, financial stability, and financial inclusion in the banking sector? Evidence from Pakistan*” Penelitian ini dilakukan pada sektor perbankan bank komersial Pakistan pada tahun 2008-2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis regresi data panel. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap *financial stability*.

Menurut Salah Mahdi et al. (2023) dengan judul penelitian “*The moderating effect of fintech on the relationship between CSR and banks' financial stability: Baron and Kenny's approach analysis*”. Penelitian ini dilakukan pada bank konvensional yang beroperasi di Qatar, UEA, Arab Saudi, Kuwait, Bahrain,

Yordania, Pakistan, dan Turki dari tahun 2010 hingga 2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis regresi efek tetap dan efek acak . Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap *financial stability* ketika diperkuat oleh peran *fintech*.

Menurut Nugroho & Bararah (2018) dengan judul penelitian “Pengaruh Good Corporate Governance dan Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap stabilitas keuangan bank umum syariah di Indonesia Tahun 2012-2017”. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis statistik regresi berganda. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap *financial stability*.

Menurut Thoha et al. (2022) dengan judul penelitian “*The Influence of Good Corporate Governance on Financial Stability*”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index pada tahun 2016-2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris dan ukuran perusahaan tidak secara signifikan mempengaruhi stabilitas keuangan perusahaan, namun, ukuran dewan direksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas keuangan.

Menurut Khan et al. (2023) dengan judul penelitian “*Does Internal Corporate Governane Mechanism Affect Financial Stability and Risk-Weighted Capital of Banks? Empirical Evidence from Pakistan*” Penelitian ini dilakukan pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Pakistan pada tahun 2010-2021. Penelitian

ini menggunakan pendekatan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rapat dewan, ukuran dewan, gender dewan, independensi dewan, komite audit, dualitas CEO dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap stabilitas keuangan, sedangkan kepemilikan administratif berpengaruh negatif terhadap stabilitas keuangan.

Menurut (Chepeliuk & Harkusha, 2021) dengan judul penelitian “*Corporate Social Responsibility As A Strategic Aspect Of Achieving Financial Stability Of A Business*” Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sukses di Ukraina dan Internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan teoritis dan empiris. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap *financial stability*.

Menurut (Cooper et al., 2019) dengan judul penelitian “*The Impact of Corporate Social Responsibility in the Banking Industry Using Troubled Asset Relief Program (TARP) as an Experimental Background*”, Penelitian ini dilakukan pada sektor perbankan di Amerika Serikat dengan fokus pada bank-bank besar yang menerima program TARP. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis univariat dan multivariat dengan data CSR dari perusahaan yang tersedia secara publik. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap *financial stability*.

Menurut (Wijaya et al., 2023) dengan judul penelitian “*Do Corporate Philanthropy, Leverage, and Company Size Affect the Financial Stability of Manufacturing Sector Companies on The Indonesia Stock Exchange?*”. Penelitian

ini dilakukan pada sektor Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis regresi data panel. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* yang menggunakan *corporate philanthropy* tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial stability*.

Menurut (Katiandagho & Dewi, 2024) dengan judul penelitian “Pengaruh Pengungkapan Kinerja Keberlanjutan, Efisiensi Operasional dan *Leverage* terhadap Stabilitas Keuangan”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis regresi data panel. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* dengan pengungkapan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial stability*.

Menurut (Uyar et al., 2022) dengan judul penelitian “*Board structure and financial stability of financial firms: Do board policies and CEO duality matter?*”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor keuangan ke lima sub-sektor utama, termasuk Perbankan, Asuransi, Perbankan Investasi & Layanan Investasi, Operasi Real Estat, dan Dana Investasi Real Estat Perumahan & Komersial (REIT). Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif variabel, analisis korelasi Spearman, dan analisis regresi data panel digunakan. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa Keberagaman gender dalam dewan direksi berpengaruh positif terhadap *financial stability* pada semua sub-sektor.

Menurut (Rahmayuni & Paminto, 2021) dengan judul penelitian “*Corporate Governance and Macroeconomics on The Financial Stability of Islamic Banks*”. Penelitian ini dilakukan pada populasi 8 Bank Umum Syariah pada tahun 2011-2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis regresi data panel. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *financial stability* dan *macroeconomics* berpengaruh negatif terhadap *financial stability*.

Menurut (Susanto & Walyoto, 2023) dengan judul penelitian “*Effect Of Corporate Governance On Financial Stability Sharia Bank In Indonesia*”. Penelitian ini dilakukan pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2015-2016 dengan jumlah sampel sebanyak 78 data. Penelitian ini menggunakan pendekatan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, dan latar belakang pendidikan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *financial stability*. Sementara itu, variabel rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *financial stability*.

Menurut (Fatma, 2024) dengan judul penelitian “*The Impact of Corporate Social Responsibility on Financial Performance, Financial Inclusion, and Financial Stability: case of Tunisia*”. Penelitian ini dilakukan pada 30 lembaga keuangan di Tunisia yang dikumpulkan setiap tahun dari tahun 2008-2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan teknik analisis data panel dengan menerapkan metode Generalized Method of Moments (GMM). Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh

positif terhadap *financial performance*, *financial inclusion*, dan *financial stability*, namun jika dengan tingkat utang yang lebih tinggi berpengaruh negatif terhadap , *financial inclusion* dan *financial stability*.

Menurut (Lukito & Arief, 2024) dengan judul penelitian “Pengaruh Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar dalam BEI periode 2018-2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Menurut (Hartati, 2020) dengan judul penelitian “Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pada sektor *Property, Real Estate dan Building Construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Menurut (Syadeli & Sa'adah, 2021) dengan judul penelitian “Pengaruh Komite Audit Kepemilikan Institusional Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dan tanggung jawab sosial berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

Menurut (Afifah et al., 2024) dengan judul penelitian “Pengaruh Dewan Direksi, Komite Audit, dan Kepemilikan Asing Terhadap Kinerja Keuangan”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor *consumer cyclicals* yang terdaftar di BEI tahun 2014-2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan teknik analisis regresi data panel. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa dewan direksi dan komite audit memiliki berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

Menurut (Febrina & Sri, 2022) dengan judul penelitian “Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris dan komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan. sedangkan dewan direksi dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Tabel 2. 2
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
1.	Orazalin et al. (2024) <i>Does CSR contribute to the financial sector's stability? The moderating role of a sustainability committee</i>	Independen: <i>Corporate Social responsibility.</i> Dependen: <i>Financial Stability.</i>	Moderasi: <i>Sustainability commite,</i> Analisis regresi efek tetap. Tempat penelitian.	<i>Corporate Social responsibility</i> berpengaruh positif terhadap <i>financial Stability.</i>	<i>Journal of Applied Accounting Research Emerald Publishing Limited</i> ISSN: 0967-5426
2.	Widi et al. (2021) <i>Influence of Corporate Social Responsibility (CSR) on Financial Performance, Financial Inclusion, and Financial Stability Banking In Indonesia</i>	Independen: <i>Corporate Social responsibility</i> Dependen: <i>Financial Stability.</i> Analisis regresi data panel.	Dependen: <i>Financial Performance, Financial Inclusion.</i> Tempat penelitian.	<i>Corporate Social responsibility</i> berpengaruh negatif terhadap <i>financial Stability.</i>	<i>International Journal of Latest Research in Humanities and Social Science (IJLRHSS)</i> Volume 04 - Issue 10, 2021 ISSN: 2347-5404.
3.	Stefany & Agustina (2022) <i>Do Corporate Social Responsibility and Political Connections Matter to Financial Performance and Financial Stability in the Banking Sector? Evidence from Indonesia</i>	Independen: <i>Corporate Social responsibility</i> Dependen: <i>Financial Stability.</i>	Independen: <i>Political Connection.</i> Dependen: <i>Financial Performance.</i> Analisis regresi kuadrat terkecil gabungan. Tempat penelitian.	<i>Corporate social responsibility</i> tidak berpengaruh terhadap <i>financial stability.</i>	<i>International Journal of Sustainable Development and Planning</i> Vol. 17, No. 8, December, 2022, pp. 2445-2452 ISSN: 1743-7601
4.	Ramzan et al. (2021) <i>How does corporate social responsibility affect financial performance, financial stability, and financial inclusion in the banking sector? Evidence from Pakistan</i>	Independen: <i>Corporate Social responsibility</i> Dependen: <i>Financial Stability</i> Analisis regresi data panel.	Dependen: <i>Financial Performance, Financial Inclusion.</i> Tempat penelitian.	<i>Corporate social responsibility</i> berpengaruh positif terhadap <i>financial stability.</i>	<i>Research Internasional Business and Finance</i> , Vol. 55, January 2021, 101314 ISSN: 0275-5319

No	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
5.	Salah Mahdi et al. (2023) “The moderating effect of fintech on the relationship between CSR and banks' financial stability: Baron and Kenny's approach analysis”	Independen: <i>Corporate Social Responsibility</i> Dependen: <i>Financial Stability</i>	Moderasi: <i>Fintech</i> Analisis regresi efek tetap dan efek acak. Tempat penelitian.	<i>Corporate social responsibility</i> Berpengaruh positif terhadap <i>financial stability</i> .	<i>EuroMed Journal of Business</i> , emjb-03-2023-0082, ISSN: 1450-2194
6.	Nugroho & Bararah (2018) Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap stabilitas keuangan bank umum syariah di Indonesia Tahun 2012-2017	Independen: <i>Good Corporate Governance</i> Dependen: <i>Financial Stability</i>	Independen: Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO). Analisis statistik regresi berganda. Tempat penelitian.	<i>Good corporate governance</i> berpengaruh negatif terhadap <i>financial stability</i> .	Jurnal Inovasi dan Bisnis 6 (2018) 160-169 ISSN: 2338-4840
7.	Thoha et al. (2022) <i>The Influence of Good Corporate Governance on Financial Stability</i>	Independen: GCG (Dewan Direksi) Dependen: <i>Financial Stability</i>	Independen: Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan. Analisis linear berganda. Tempat penelitian.	Dewan direksi berpengaruh positif terhadap <i>financial stability</i> .	<i>The 3rd International Conference on Governance, Public Administration, and Social Science (ICoGPASS), KnE Social Sciences</i> , pages 337–353. ISSN: 2518-668X
8.	Khan et al. (2023) <i>Does Internal Corporate Governance Mechanism Affect Financial Stability and Risk-Weighted Capital of Banks? Empirical Evidence from Pakistan</i>	Independen: GCG (Dewan Direksi, Kepemilikan Institusional dan Komite Audit) Dependen: <i>Financial Stability</i> Analisis regresi data panel.	Independen: Komisaris Independen, Rapat Dewan Direksi, Dualitas CEO, Keberagama Gender, Dewan Direksi Asing Dependen: <i>Risk-Weighted Capital</i> .	Kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh positif terhadap <i>financial stability</i> .	<i>Research Grants Council (RGC) of Hong Kong (project number 12500915), and Ministry of Science and Technology (MOST, Project Numbers 106-2410-H-468-</i>

No	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
			Tempat penelitian		002 and 107- 2410-H-468- 002-MY3), Taiwan
9.	Chepeliuk & Harkusha (2021) <i>Corporate Social Responsibility As A Strategic Aspect Of Achieving Financial Stability Of A Business</i>	Independen: <i>Corporate Social responsibility</i> Dependen: <i>Financial Stability</i>	Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis teoritis dan analisis empiris Tempat penelitian	<i>Corporate social responsibility</i> berpengaruh positif terhadap <i>financial stability</i> .	<i>Development Management:</i> 18(4), 19-29. ISSN: 2413-9610
10.	Cooper et al. (2019) <i>"The Impact of Corporate Social Responsibility in the Banking Industry Using Troubled Asset Relief Program (TARP) as an Experimental Background"</i>	Independen: <i>Corporate Social responsibility</i> Dependen: <i>Financial Stability</i>	Menggunakan pendekatan analisis univariat dan multivariat. Tempat penelitian	<i>Corporate social responsibility</i> berpengaruh positif terhadap <i>financial stability</i> .	<i>Managerial Finance</i> , Vol. 45 No. 8, pp. 1111-1128. ISSN: 0307-4358
11.	Wijaya et al., (2023) <i>Do Corporate Philanthropy, Leverage, and Company Size Affect the Financial Stability of Manufacturing Sector Companies on The Indonesia Stock Exchange?</i>	Dependen: <i>Financial Stability</i> Analisis regresi data panel	Independen: <i>Corporate Philanthropy</i> Tempat penelitian	<i>Corporate social responsibility</i> yang menggunakan <i>corporate philanthropy</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>financial stability</i> .	Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis, Vol. 9 No.3, ISSN: 2528-5149
12.	Katiandagho & Dewi (2024) Pengaruh Pengungkapan Kinerja Keberlanjutan, Efisiensi Operasional dan Leverage terhadap Stabilitas Keuangan	Dependen: <i>Financial Stability</i> Analisis regresi data panel	Independen: Pengungkapan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan	<i>Corporate social responsibility</i> dengan pengungkapan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>financial stability</i> .	AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis Vol. 4, No. 3, E-ISSN 2774-888X

No	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
13.	Uyar et al., (2022) <i>Board structure and financial stability of financial firms: Do board policies and CEO duality matter?</i>	Independen: Dewan direksi Dependen: <i>Financial Stability</i> Analisis regresi data panel	Independen: Dewan direksi, Dewan Komisaris Independen Moderasi: Kebijakan dewan dan Dualisme CEO Analisis korelasi Spearman Tempat penelitian	Keberagaman gender dalam dewan direksi berpengaruh positif terhadap <i>financial stability</i> .	<i>Journal of International Accounting, Auditing and Taxation</i> Volume 47, June 2022, 100474. ISSN: 1061-9518
14.	Rahmayuni & Paminto (2021) <i>Corporate Governance and Macroeconomic s on The Financial Stability of Islamic Banks</i>	Independen: <i>Corporate Governance</i> Dependen: <i>Financial Stability</i> Analisis regresi data panel	Independen: <i>Macroeconomics</i> Tempat penelitian	<i>Corporate governance</i> tidak berpengaruh terhadap <i>financial stability</i> .	<i>International Journal of Entrepreneurs hip and Business Development:</i> Volume 04 Number 04 07-2021 ISSN : 2597-4750
15.	Susanto & Walyoto (2023) <i>Effect Of Corporate Governance On Financial Stability Sharia Bank In Indonesia</i>	Dependen: <i>Financial Stability</i>	Independen: ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, latar belakang pendidikan dewan komisaris, dan rapat dewan komisaris Analisis regresi linear berganda Tempat penelitian	Hanya rapat dewan komisaris yang berpengaruh positif terhadap <i>financial stability</i> .	<i>Journal of Management and Islamic Finance</i> 3(1):132-143. ISSN: 2797-9636
16.	Fatma (2024) <i>The Impact of Corporate Social Responsibility on Financial Performance, Financial Inclusion, and Financial Stability: case of Tunisia</i>	Independen: <i>Corporate Social responsibility</i> Dependen: <i>Financial Stability</i> Analisis regresi data panel	Independen: <i>Financial inclusion, financial performance</i> Tempat penelitian	<i>Corporate social responsibility</i> berpengaruh positif terhadap <i>financial stability</i> .	<i>Research Square ; 1-10</i> ISSN: 2693-5015

No	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
17.	Lukito & Arief (2024) Pengaruh Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan	Independen: Dewan direksi, komite audit	Dependen: Kinerja keuangan (ROA) Analisis regresi linear berganda Tempat penelitian	Dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.	Jurnal Ekonomi Trisakti, Vol. 4 No. 2 Oktober 2024 : hal : 1111-1122. e-ISSN: 2339-0840
18.	Hartati (2020) Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan	Independen: Kepemilikan Institusional, komite audit	Dependen: Kinerja keuangan (ROA) Analisis regresi linear berganda Tempat penelitian	Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.	EKOMABIS: Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis, Volume 01 Issue 02– Juli 2020. e-ISSN: 2716-0238
19.	Syadeli & Sa'adah (2021) Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan	Independen: <i>Corporate social responsibility</i> , Kepemilikan Institusional, komite audit	Dependen: Kinerja keuangan (ROA) Analisis regresi linear berganda Tempat penelitian	komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dan tanggung jawab sosial berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan	Jurnal Administrasi dan Bisnis, Volume 15, Nomor 1, Juni 2021, ISSN: 1987-726X
20.	Afifah et al., (2024) Pengaruh Dewan Direksi, Komite Audit, dan Kepemilikan Asing Terhadap Kinerja Keuangan	Independen: Dewan direksi, komite audit Analisis regresi data panel	Dependen: Kinerja keuangan (ROA) Tempat penelitian	Dewan direksi, komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan	Jurnal Akuntansi dan Ekonomika, Vol. 14 No. 1, Juni 2024. ISSN: 2613-9901
21.	Febrina & Sri (2022) Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Dan	Independen: Dewan direksi, komite audit	Dependen: Kinerja keuangan (ROA) Analisis regresi linear berganda	Dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Komite audit berpengaruh	Jurnal Informasi Akuntansi, Vol, No1, Juni 2022. ISSN: 2830-2737

No	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
	Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan		Tempat penelitian	positif terhadap kinerja keuangan	
SILMA NAUROTU SALSABILA (213403002) Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> , Kepemilikan Institusional, Dewan Direksi, Dan Komite Audit Terhadap <i>Financial Stability</i> (Survei Pada Perusahaan Industri Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023).					

2.2 Kerangka Pemikiran

Financial stability (stabilitas keuangan) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan. (Thoha et al., 2022) mengungkapkan ketidakstabilan sistem keuangan akan membahayakan dan menghambat kegiatan perekonomian perusahaan dan menyebabkan krisis atau kekurangan dana. Dalam hal ini, perusahaan akan membutuhkan biaya yang didistribusikan secara adil untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian karena ketidakstabilan keuangan. Dengan demikian, ketidakstabilan keuangan pada perusahaan akan berdampak pada kepercayaan investor sehingga dapat membuat investor menarik dana mereka. Oleh karena itu stabilitas keuangan sangat penting untuk dinilai karena dapat menunjukkan apakah perusahaan akan menghadapi ancaman.

Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi nilai perusahaan yaitu *corporate social responsibility*. *Corporate social responsibility* merupakan usaha yang ditempuh oleh perusahaan untuk menunjukkan komitmennya terhadap tanggung jawab sosial, sebagai manifestasi dari prinsip-prinsip etika dalam mencapai kinerja jangka panjang (Shakila et al., 2024). Orazalin et al., (2022) menyatakan bahwa CSR memungkinkan perusahaan untuk menarik calon investor, meningkatkan

keunggulan kompetitif, dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan loyalitas pelanggan, risiko reputasi yang lebih rendah, dan peningkatan motivasi karyawan. Manfaat ekonomi CSR tersebut dapat menghasilkan hasil keuangan yang positif, seperti peningkatan profitabilitas dan pengurangan risiko keuangan. Menurut Zain (2021) *stakeholder* adalah kelompok atau individu yang diuntungkan atau dirugikan oleh tindakan perusahaan dan yang haknya telah dilanggar atau dihormati oleh tindakan perusahaan. Teori *stakeholder* ini menekankan bahwa membangun hubungan yang kuat dengan semua pihak yang berkepentingan akan membantu bisnis menggunakan sumber daya secara lebih efisien, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil kinerja keuangan. Berfokus pada pemenuhan harapan dan kebutuhan berbagai pemangku kepentingan, keterlibatan CSR dapat menciptakan nilai bagi pemegang saham dan pihak lain. Keterlibatan CSR juga merupakan mekanisme penting untuk mempertahankan kepercayaan publik dan membangun hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan. Studi sebelumnya (Ramzan et al., 2021) juga menunjukkan bahwa perusahaan yang memenuhi tuntutan pemangku kepentingan terkait CSR cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik. Secara keseluruhan, pendekatan CSR tidak hanya berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan keunggulan kompetitif, tetapi juga berpengaruh positif terhadap stabilitas keuangan perusahaan.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Orazalin et al., 2023), (Ramzan et al., 2021) dan (Salah Mahdi et al., 2023) yang mengungkapkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap *Financial Stability*. Namun berbeda

dengan hasil peneilitan (Wijaya et al., 2023), (Stefany & Agustina, 2022), dan (Katiandagho & Dewi, 2024) yang menyatakan bahwa *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap *Financial Stability*.

Faktor kedua yaitu kepemilikan institusional. Menurut septanta (2023: 98) kepemilikan institusional didefinisikan sebagai tingkat kepemilikan saham oleh institusi dalam perusahaan, diukur oleh proporsi saham yang dimiliki oleh institusional pada akhir tahun yang dinyatakan dalam persentase menyatakan bahwa para investor institusional pada umumnya menginvestasikan dananya lebih besar. (Monica & Dewi, 2019) mengemukakan kepemilikan institusional umumnya dikaitkan dengan pengawasan yang lebih besar terhadap manajemen. Ini dapat memungkinkan manajemen untuk lebih berkonsentrasi pada pencapaian kinerja keuangan yang baik dan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Menurut (Rahayu & Wahyudi, 2024) salah satu bagian penting dari struktur tata kelola yang efektif adalah kepemilikan institusional, yang membantu menciptakan nilai yang stabil dan berkelanjutan. Ini karena kepemilikan institusional dapat meningkatkan akuntabilitas manajemen dan mendorong praktik tata kelola perusahaan yang lebih baik, baik bagi pemegang saham maupun seluruh komunitas perusahaan. Menurut (Monica & Dewi, 2019) kepemilikan institusional merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk mengurangi *agency conflict*. Secara teoritis bahwa semakin kuat kontrol terhadap perusahaan maka akan semakin tinggi pula kepemilikan institusional terhadap perusahaan, kinerja perusahaan akan naik apabila pemilik perusahaan bisa mengendalikan perilaku manajemen supaya bertindak sesuai dengan tujuan perusahaan.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Khan et al., 2023) dan (Hartati, 2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *financial stability*. Namun berbeda dengan hasil penelitian (Syadeli & Sa'adah, 2021) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *financial stability*.

Faktor ketiga yaitu dewan direksi. Menurut (Syofyan, 2021: 54) Direksi adalah anggota unsur perusahaan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif di perusahaan. Direksi mengendalikan operasi perusahaan sehari-hari dalam batas-batas yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perseoran Terbatas (UUPT), Anggaran Dasar dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta di bawah pengawasan dewan komisaris. Hamid & Purbawangsa (2022) mengemukakan bahwa jajaran dewan direksi diharapkan dapat menemukan peluang pertumbuhan dan mengurangi risiko yang berdampak pada kinerja keuangan perusahaan. Menurut (Afifah et al., 2024) teori keagenan menyoroti peran dewan direksi sebagai pengambil keputusan telah sejalan dengan kebijakan keuangan dan tujuan perusahaan. Efektivitas peran dewan direksi mendorong para eksekutif untuk mengeskalasi performa finansial perusahaan. Jadi dapat disimpulkan dewan direksi yang lebih besar memungkinkan perusahaan memiliki lebih banyak tenaga ahli untuk menangani berbagai isu strategis.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Thoha et al., 2022), (kham et al., 2023) dan (Afifah et al., 2024) yang menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap *financial stability*. Namun berbeda dengan hasil penelitian (Febrina & Sri,

2022) yang menyatakan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap *financial stability*.

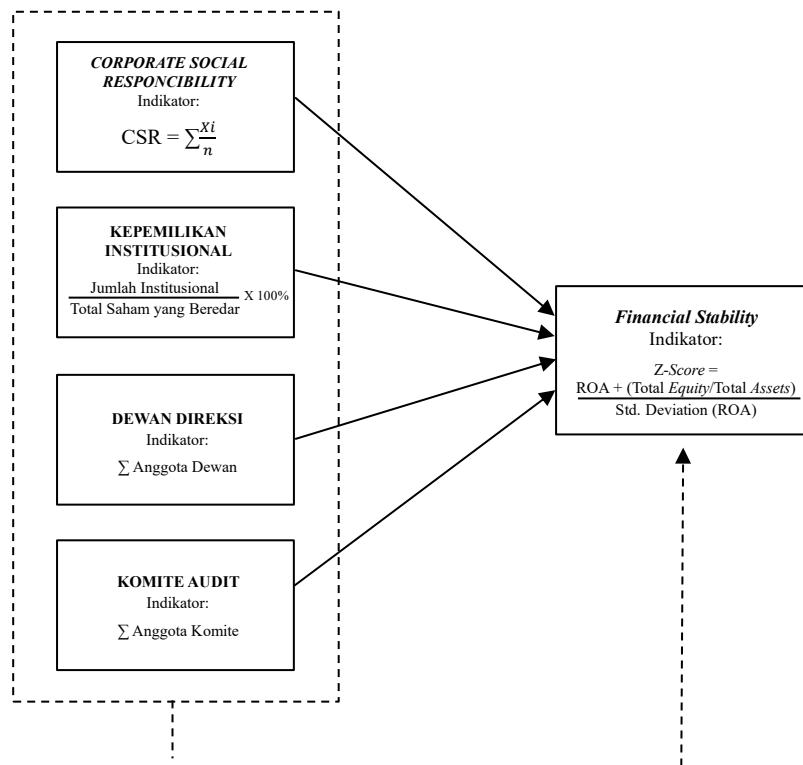
Faktor keempat yaitu komite audit. Menurut Syofyan (2021: 25) komite audit merupakan suatu badan yang dibentuk oleh dewan komisaris dari perusahaan yang tugasnya adalah untuk melakukan fungsi pengawasan dan menjaga independensi akuntan pemeriksa internal terhadap tim manajemen sesuai dengan prinsip GCG (*Good corporate Governance*). Secti et al. (2024) mengungkapkan bahwa semakin banyak komite audit yang dimiliki perusahaan akan melindungi dan mengontrol lebih baik proses akuntansi dan keuangan, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kinerja keuangan perusahaan. Menurut (Afifah et al., 2024) teori keagenan mengakui bahwa efektivitas komite audit sangat penting untuk mengatasi masalah agensi. Adanya komite audit yang kuat dapat mengurangi kemungkinan tindakan menyimpang dari manajemen dan memastikan bahwa laporan keuangan disajikan dengan benar.

Dalam hasil penelitian (Khan et al., 2023) dan (Afifah et al., 2024) menyatakan bahwa Komite Audit berpengaruh positif terhadap *financial stability*. Namun berbeda dengan hasil penelitian (Hartati, 2020) dan (Lukito & Arief, 2024) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *financial stability*.

Penelitian ini akan menguji pengaruh *corporate social responsibility*, kepemilikan institusional, dewan direksi, dan komite audit terhadap *financial stability*, baik secara parsial maupun simultan. Berdasarkan kajian empiris dari

penelitian sebelumnya, hipotesis penelitian ini mengusulkan bahwa keempat faktor tersebut secara simultan dan parsial memiliki pengaruh terhadap *financial stability*.

Berdasarkan uraian pemikiran di atas, maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterangan :

—————→ = Hubungan secara parsial

-----→ = Hubungan secara simultan

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Dengan mengacu pada latar belakang masalah, identifikasi permasalahan, kajian literatur, serta kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. *Corporate Social Responsibility* secara parsial berpengaruh terhadap *Financial Stability*.
2. Kepemilikan Institusional secara parsial berpengaruh terhadap *Financial Stability*.
3. Dewan Direksi secara parsial berpengaruh terhadap *Financial Stability*.
4. Komite Audit secara parsial berpengaruh terhadap *Financial Stability*.
5. *Corporate Social Responsibility* , Kepemilikan Institusional, Dewan Direksi, Dan Komite Audit secara simultan berpengaruh terhadap *Financial Stability*.